

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono;

Aksi Spekulasi Harus Dilawan

Perdagangan Sebagai Sektor
Penggerak Pertumbuhan dan
Daya Saing Ekonomi, serta
Penciptaan
Kemakmuran
Rakyat

**remarkable
Indonesia**

JFX Acuan
Kakao Dunia
....8-9

Puskompas
Sinergi PLKA & SRG
....11

POLDA DIY
Ungkap Investasi
Bodong
....16



Foto : Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya, berbincang-bincang dengan Gubernur Jatim, Soekarwo, di sela-sela RAKORNAS III TPID 2012.

Slowly but sure, Sistem Resi Gudang (SRG) akhirnya diangkat menjadi program nasional. Hal itu terungkap pada Rakornas III Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2012, yang penyelenggaraannya dibuka oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 16 Mei 2012, di Hotel Sahid, Jakarta. Rakornas ini dihadiri Pemda dan Anggota DPRD kabupaten/ kota dari 66 daerah yang dijadikan basis perhitungan inflasi nasional.

Rakornas III TPID 2012 itu, memutuskan dan menyepakati bahwa SRG dijadikan sebagai salah satu instrumen pengendali inflasi dari harga komoditi pangan, utamanya beras.

Dalam arahan yang disampaikan SBY, dikatakan, "Inflasi akan selalu ada, baik dalam keadaan normal apalagi dalam keadaan krisis. Maka pemerintah harus aktif mengendalikan inflasi, dan tidak boleh semata-mata diserahkan pada mekanisme pasar."

Oleh karena itu, pemerintah harus mengintervensi untuk mengendalikan angka inflasi. Dikatakan SBY, dalam rangka mengendalikan inflasi setidaknya ada empat strategi pemerintah, yakni pertama, menjamin pasokan dan permintaan produk pangan, guna menjaga stabilitas harga. Kedua, perbaikan distribusi pasokan bahan pangan. Ketiga, perbaikan informasi harga jual pangan dari petani sampai ke pembeli. Empat, mencegah aksi spekulasi yang merusak harga.

Dibagian lain SBY mengatakan, "aksi para spekulasi saat ini menjadi perkara di tingkat global." Karena itu, "TPID harus mengontrol lebih ketat dan menindak tegas siapa saja yang mempermainkan harga pangan. Spekulasi harga bahan pangan

berdampak buruk terhadap petani dan juga masyarakat. Indonesia harus bisa menunjukkan perlawanan terhadap spekulasi harga pangan di dalam negeri," ucap SBY.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa, dalam memimpin Rakornas III TPID, mengatakan implementasi SRG di daerah belum optimal dan masih menghadapi kendala. Pada hal, SRG sudah diinisiasi pemerintah sejak tahun 2006 yang diharapkan menjadi salah satu solusi mengatasi permasalahan fluktuasi harga dan sekaligus mendorong peningkatan pendapatan usaha tani serta membuka akses permodalan bagi petani.

"Oleh karena itu, kita harus menyusun rencana aksi bersama kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat penerapan SRG di berbagai daerah dengan membentuk task force di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian," papar Hatta.

"Agar akselerasi gugus tugas ini berjalan cepat, koordinasinya akan saya pimpin langsung," tegas Hatta. Koordinasi percepatan implementasi SRG itu mencakup sosialisasi terpadu SRG, meningkatkan komitmen dan partisipasi daerah serta sektor swasta. Membangun dan mengembangkan fasilitas pengelolaan gudang, penguatan kelembagaan petani dan penanganan pasca panen, mendorong akses pembiayaan serta monitoring dan evaluasi secara periodik.

Semoga dengan langkah-langkah pemerintah ini di masa mendatang SRG menjadi solusi bagi petani dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya.

Salam!

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE



Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggu- Jawab

Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi

Nizarli

Wakil Pemimpin Redaksi

Subagiyo

Dewan Redaksi

Pantas Lumban Batu, Agus
Muharni S., Harry Prihatmoko,
Diah Sandita Arisanti, Poppy
Juliyanti, Erni Artati, Sri
Haryati, Rizali Wahyuni

Sirkulasi

Apriliyanto, Katimin, Umar
Hasan.

Alamat Redaksi

Gedung Bappebti Jl. Kramat
Raya No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

*Redaksi menerima artikel
ataupun opini dikirim lengkap
dengan identitas serta foto ke
E-mail:
buletin@bappebti.go.id*



Berita Utama.....4-7

- Aksi Spekulasi Harus Dilawan
- SRG Tidak Boleh Jatuh Ke Tangan Spekulasi
- Implementasi SRG Dipercepat

Pasar Lelang.....10-11

- Wapres RI, Boediono; PLKA Beri Keuntungan Semua Pihak
- Puskompas Sinergi PLKA & SRG

Interview12-13

- Wamendag, Bayu Krisnamurthi;
Optimis Tapi Harus Realistis

Agenda Foto14-15

Aktualita.....16-17

- POLDA DIY Ungkap Investasi Bodong
- JFX Pepet Pojok Bursa BEI di UTY
- Transaksi Mutilateral BKDI Capai 49,8 %
- Laba Bersih JFX Tahun 2011 Melonjak 34,5 %

Analisa.....18

Info Harga.....19

Wawasan.....22-23

- Persyaratan Calon Penerima Subsidi SRG

Kolom.....24-25

- Potensi SRG Untuk Pembiayaan Usaha Sektor Pertanian

Breaknews.....26

Berjangka.....8-9

JFX Acuan Kakao Dunia



Komoditi...20-21

Minyak Kacang Warisan Dunia



Kiprah...27

Sang Motivator SEF





Aksi Spekulasi Harus Dilawan

Spekulasi harga bahan pangan berdampak buruk terhadap petani dan juga masyarakat. Indonesia harus bisa menunjukkan perlawanan terhadap spekulasi harga pangan di dalam negeri.

Pemerintah senantiasa berupaya mengendalikan laju inflasi. Karena inflasi musuh utama dalam pertumbuhan ekonomi. Laju inflasi harus terkontrol agar tidak berdampak buruk bagi kemampuan daya beli masyarakat. Jika terjadi penurunan daya beli masyarakat, pemerintah baik pusat dan daerah harus aktif mengendalikan laju inflasi tersebut.

Demikian antara lain disampaikan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2012, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 16 Mei 2012. Rakornas III TPID 2012 ini dihadiri sebanyak 66 Pemda dan sejumlah pejabat dari berbagai kementerian. Di antaranya, Menkopereknomian, Hatta Radjasa, Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, Mendagri, Gamawan Fauzi, Mentan Suswono, Menteri ESDM, Jero Wacik, Wakil Menkeu, Mahendra Siregar dan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi.

“Inflasi akan selalu ada, baik dalam

keadaan normal apalagi dalam keadaan krisis. Maka pemerintah harus aktif mengendalikan inflasi, dan tidak boleh semata-mata diserahkan pada mekanisme pasar,” tegas Presiden SBY.

“Pemerintah senantiasa sejahterakan masyarakat. Tetapi seringkali muncul dilema dalam penentuan harga pangan. Di satu sisi, petani ingin harga jual produknya tinggi sehingga memberikan penghasilan yang makin baik. Sementara masyarakat ingin harga beras terjangkau. Persoalan-persoalan semacam inilah yang harus dicarikan solusinya oleh Tim Pengendali Inflasi,” papar SBY.

4 langkah

Menurut SBY, ada empat langkah yang bisa diintervensi pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Keempat langkah itu masing-masing, pertama, menjamin pasokan dan permintaan produk pangan, guna menjaga stabilitas harga. Kedua, perbaikan distribusi pasokan bahan pangan. Ketiga, perbaikan informasi harga jual pangan dari petani sampai ke pembeli. Empat, mencegah aksi speku-

lan yang merusak harga.

“Aksi para spekulasi saat ini menjadi perkara di tingkat global. Hal itu terungkap di pertemuan negara anggota G-20 lalu,” terang SBY.

Terkait itu, SBY dengan tegas mengatakan, “TPID harus mengontrol lebih ketat dan menindak tegas siapa saja yang mempermainkan harga pangan.”

“Spekulasi harga bahan pangan berdampak buruk terhadap petani dan juga masyarakat. Indonesia harus bisa menunjukkan perlawanan terhadap spekulasi harga pangan di dalam negeri,” ucap SBY.

Mari kita buktikan di dalam negeri. Mari kita lawan, jangan mereka menimbun bahan pangan seenaknya. Mempermainkan harga yang jadi korban adalah petani dan kita semua masyarakat,” tegas SBY.

Diakhir sambutannya, SBY menginstruksikan, “TPID harus meningkatkan produksi dan distribusi sumber pangan. Sebab, peningkatan produksi dan distribusi pangan yang lancar dapat menekan laju inflasi,” imbuah Presiden SBY. ▲



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka RAKORNAS III TPID

Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution;

SRG Tidak Boleh Jatuh Ketangan Spekulan

“Jangan sampai program SRG ini dikuasai ‘pemain’ yang ada, sebab kalau mereka lagi yang menguasai program ini tidak akan jalan.”

Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam pengendalian harga komoditi pangan. Selain itu, mendorong kelancaran perdagangan antar daerah serta membuka akses informasi harga pangan. Demikian antara lain dikatakan Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, dalam laporannya mewakili kelompok kerja nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Rakornas III TPID 2012 yang dihadiri Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah

lah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, serta sejumlah pejabat Pemda dari 66 daerah di Hotel Grand Sahid, Jakarta, 16 Mei 2012.

Dikatakan Darmin Nasution, informasi harga dalam pengendalian inflasi sangat penting. Oleh karena itu, tema Rakornas III TPID 2012 mengambil tema ‘Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Stabilitas Harga Melalui Penguatan Ketahanan Pangan serta Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Harga Pangan Strategis.’

“Beberapa langkah strategis yang ditempuh TPID dan berkontribusi positif terhadap pengendalian inflasi, antara lain, melalui penguatan program komunikasi kebijakan di daerah sehingga mampu mengarahkan ekspektasi inflasi,” ujar Darmin Nasution.

Selain itu, pemerintah harus menyiapkan alternatif pencadangan sistem distribusi pangan. Sehingga bisa memperbaiki struktur pasar terutama distribusi beras di Indonesia.

“Pemain distribusi beras di Indonesia itu ‘kan tidak banyak, jadi den-

gan menyebarnya gudang-gudang dari sistem resi gudang (SRG), diharapkan bisa memperbaiki sistem distribusi beras,” katanya.

Untuk itu, Darmin mengharapkan SRG tidak dikuasai oleh para ‘pemain’ distribusi barang pokok, sebab niat baik dari program ini bisa tidak terwujud. Di bagian lain, tegas mantan Dirjen Pajak ini, mengatakan, dalam kesempatan itu menekankan pentingnya mekanisme pembiayaan subsidi SRG yang menarik minat perbankan menyalurkan pembiayaan dengan bunga 6 %.

“Mekanisme pembayaran subsidi SRG harus cepat. Agar perbankan tidak alergi menyalurkan pembiayaan resi gudang. Oleh karena itu pemerintah harus mempelajari dan mengkajinya agar pembayaran bisa tepat waktu sehingga bank-bank itu termotivasi memasuki bisnis pembiayaan SRG,” ujar Darmin Nasution. ▲





RAKORNAS III TPID 2012

MENINGKATKAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG STABILITAS HARGA MELALUI PENGUATAN KETAHANAN PANGAN SERTA OPTIMALISASI PEMANFAATAN INFORMASI HARGA PANGAN STRATEGIS

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, 16 Mei 2012



Menkoperekonomian, Hatta Radjasa;

Implementasi SRG Dipercepat

Implementasi sistem resi gudang (SRG) harus dipercepat di berbagai daerah dan pelaksanaannya dilakukan dengan gugus tugas lintas Kementerian, Bank Indonesia (BI) serta dikoordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. SRG merupakan salah satu program yang dikembangkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan inflasi daerah mulai

dari proses produksi hingga distribusi.

“Pada kesempatan ini kita harus sepakat untuk menjaga ketahanan pangan di daerah sebagai program yang utama untuk menjaga stabilitas harga pangan dan inflasi daerah, mulai dari proses produksi sampai distribusi. Untuk itu SRG menjadi penting,” jelas Menko Perekonomian, Hatta Radjasa, saat memimpin diskusi dengan tema ‘Penguatan Cadangan Pangan dan Peningkatan Perdagangan Pangan Antar Daerah’ di Rakornas III Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2012. Narasumber pada diskusi tersebut, yakni Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, Mendagri, Gamawan Fauzi, Mentan Suswono, Menteri ESDM, Jero Wacik, Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar dan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi.

Pada diskusi tersebut, ada dua isu utama yang menjadi topik bahasan. Pertama, isu penguatan cadangan pangan melalui penerapan SRG. Kedua, isu kelancaran perdagangan antar daerah dan pengembangan pusat informasi harga pangan strategis.

Dikatakan Hatta, implementasi SRG

saat ini masih dirasa belum optimal dan masih menghadapi kendala di lapangan. Pada hal, SRG sudah diinisiasi pemerintah sejak tahun 2006 yang diharapkan menjadi salah satu solusi mengatasi permasalahan fluktuasi harga dan sekaligus mendorong peningkatan pendapatan usaha tani serta membuka akses permodalan bagi petani.

“Oleh karena itu, kita harus menyusun rencana aksi bersama kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat penerapan SRG di berbagai daerah dengan membentuk task force di bawah koordinir Kemenko Perekonomian,” papar Hatta.

“Agar akselerasi gugus tugas ini berjalan cepat, koordinasinya akan saya pimpin langsung,” jabar Hatta.

Dalam penjelasan Hatta, koordinasi percepatan implementasi SRG mencakup sosialisasi terpadu mengenai SRG, meningkatkan komitmen dan partisipasi daerah serta sektor swasta. Membangun dan mengembangkan fasilitas pengelolaan gudang, penguatan kelembagaan petani dan penanganan pasca panen, mendorong akses pembiayaan serta monitoring dan evaluasi secara periodik.

“*kita harus menyusun rencana aksi bersama kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat penerapan SRG di berbagai daerah dengan membentuk task force di bawah koordinir Kemenko Perekonomian,*”

Rakor Teknis SRG

Wamendag Bayu Krisnamurthi dalam kesempatan itu juga mengatakan, sejatinya perbankan sudah siap untuk terlibat dalam pelaksanaan resi gudang. “Sayangnya, itu belum termanfaatkan lantaran masih rendahnya pemahaman petani mengenai SRG.”

Tahun 2012 ini, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti menargetkan akan ada sebanyak 80 gudang untuk menyimpan komoditas pangan produksi petani. Komoditi yang saat ini bisa dimasukkan dalam sistem resi gudang antara lain komoditi gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut dan rotan.

“Di luar gudang yang dibangun pemerintah, komoditi SRG juga bisa memanfaatkan gudang milik swasta dan BUMN. Gudang BUMN yang sangat mungkin dilibatkan dalam SRG karena umumnya sudah memenuhi standar SNI,” jelas Bayu.

Dipaparkan Bayu, guna memberi dorongan Pemda mengembangkan dan pemanfaatan gudang SRG sebagai sarana pengendali inflasi dan ketahanan pangan, akan diselenggarakan Rakor Teknis SRG.

“Setelah Rakornas III TPID, ini, Kementerian Perdagangan akan menyelenggarakan Rakor Teknis SRG. Sehingga pemerintah daerah punya visi yang sama dengan pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan Bayu, kerjasama dan sinergi antar instansi sangat penting dalam pengembangan SRG. Oleh karena itu, di daerah juga perlu dibentuk Tim Terpadu SRG berdasarkan SK Bupati atau Walikota. Tim Terpadu SRG di tingkat daerah itu melibatkan dinas perdagangan, pertanian, ketahanan pangan, koperasi, Bulog, perbankan, asosiasi, kelompok tani dan stakeholder lainnya.

“Dengan dibentuknya Tim Terpadu SRG itu, maka harus disusun jadwal terpadu rencana implementasi SRG. Kemudian berkoordinasi dengan Bappebti atau Kemendag,” pungkash Bayu Krisnamurthi. ▲



SRG Hindari Petani Dari Cengkraman Tengkulak

Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Arifin, dalam testimonya terkait dengan implementasi SRG di Kabupaten Barito Kuala, mengatakan SRG mulai beroperasi sejak Desember 2010. Hal itu bermula dari keluhan para petani mengenai harga beras yang anjlok pada saat panen raya sehingga merugikan petani. Tetapi dengan adanya SRG ini maka pada saat panen petani dapat menyimpan hasil panennya di gudang.

“Jadi ditunda penjualan hasil panennya. Tapi kemudian, ketika harga mulai naik barulah petani menjual komoditinya. Intinya SRG ini menghindari petani dari cengkraman tengkulak,” jelas Rudy Arifin, dihadapan peserta Rakornas III TPID, saat diskusi dengan tema ‘Implementasi program TPID melalui pengembangan sistem informasi harga bahan pangan pokok dan penguatan ketahanan pangan untuk mendukung terciptanya stabilitas harga di daerah.’

Narasumber lain pada diskusi tersebut yakni Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, Kadisperindag, Jateng, Iwan Sudrajat, Sekjen Asbanda, Jeffry J. Wurangian, Pemred Harian Bisnis Indonesia, Arief Budisusilo. Diskusi ini dimoderatori presenter TV Indosiar, Tina Thalisa.

Lebih jauh dikatakan Rudy Arifin, dengan penyimpanan komoditi itu, petani mendapatkan resi atau bukti simpan yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

“Hingga saat ini sudah ada sebanyak 16 kelompok tani yang melakukan penyimpanan komoditi gabah di gudang SRG dan mendapat pembiayaan dari BPD

Kalsel,” jelas Rudy Arifin

Rudy Arifin, mengatakan, “kami juga mendapat dukungan dari DPRD Kalsel untuk mengembangkan SRG. Bersama dengan DPRD Kalsel, kami sedang mempersiapkan rencana pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD), sehingga semakin mempermudah akses petani terhadap pembiayaan perbankan.”

“Dengan lembaga itu, diharapkan produktivitas petani meningkat dan kesejahteraan semakin baik, di sisi lain ketersediaan pangan semakin meningkat sehingga harga komoditi pangan relatif stabil,” beber Rudy Arifin.

Di bagian lain, Kepala Bappebti, mengatakan, sejak SRG digulirkan pemerintah saat ini sudah ada sebanyak lima bank yang menyalurkan pembiayaan SRG. Masing-masing BRI, BPD Jabar Banten, BPD Jatim, BPD Jateng dan BPD Kalsel.

“Pembiayaan SRG melalui lima bank tersebut petani akan mendapat subsidi bunga bank. Dengan subsidi itu, petani hanya dikenakan bunga bank sebesar 6 % paling lama enam bulan,” jelas Syahrul.

Di tempat terpisah, Syahrul R. Sempurnajaya, mengatakan, dengan diangkanya SRG sebagai salah satu instrumen pengendali inflasi daerah merupakan wujud keseriusan pemerintah menjamin stabilitas harga pangan baik di tingkat petani maupun di tingkat konsumen.

“SRG memberi kepastian pemasaran hasil komoditi bagi kalangan petani. Dengan demikian petani mendapat harga yang layak sehingga tingkat kesejahteraannya pun terangkat,” tandas Syahrul R. Sempurnajaya. ▲



Petugas PT. BT COCOA INDONESIA memeriksa kualitas kakao disaksikan Direksi KBI dan JFX serta Pejabat Bappebti

JFX Acuan Kakao Dunia

Perdagangan kontrak berjangka kakao JFX, diharapkan berkontribusi langsung ke petani kakao. Serta, menggairahkan industri hilir kakao nasional.

Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen dan eksportir utama komoditi kakao di dunia. Adalah sangat tepat, peluang Indonesia untuk menjadi barometer dalam perdagangan kakao dan harga acuan kakao dunia, semakin terbuka lebar. Kabar baiknya, Jakarta Futures Exchange (JFX) dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) memfasilitasi serah terima fisik perdana sebagai bentuk penyelesaian kontrak berjangka kakao (CC5). Serah terima fisik tersebut, dilakukan antara PT Core Indonesia (CI) selaku penjual dan PT BT

Cocoa Indonesia (BTCI) selaku pembeli, pada 14 Mei 2012, di Kompleks Perdagangan Kakao Makassar, Sulawesi Selatan.

Hadir dalam acara ini, Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, yang mewakili Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya, Sekretaris Bappebti, Nizarli, Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Surdiyanto Suryodarmodjo, Direksi JFX, Made Soekarwo dan Bihar Sakti Wibowo, Sekretaris Disperindag Sulsel, Suwiknyo, asosiasi kakao, serta pelaku pasar berjangka nasional.

Dalam sambutan Kepala Bappebti, mengatakan, serah terima fisik kakao JFX membuktikan instrumen perdagangan berjangka semakin berkembang, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha dalam mengatasi gejolak harga pasar. "Diharapkan dengan serah fisik ini, citra perdagangan berjangka komoditi Indonesia dapat terangkat."

Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo, menjelaskan dalam

transaksi tersebut jumlah kakao yang diserahterimakan sebanyak 3 lot atau 15 ton, yang jatuh tempo pada bulan Mei 2012. "Kontrak kakao JFX saat ini telah menjadi salah satu referensi harga bagi pelaku usaha kakao, baik pelaku usaha lokal maupun luar negeri. Bahkan, saat ini harga settlement price kontrak kakao JFX telah mempengaruhi pergerakan harga di bursa Internasional," jelas Bihar.

Data JFX menunjukkan, volume transaksi kontrak kakao di bulan April 2012 mencapai 4.785 lot atau naik 14,28 % dibandingkan dengan 4.187 lot di bulan Maret. Hingga akhir tahun, JFX targetkan kontrak kakao tembus 60.000 lot.

Mutu biji kontrak kakao fermented yang diperdagangkan JFX sesuai dengan SNI. Hal ini untuk memicu pengusaha kakao nasional untuk meningkatkan kualitas biji kakaonya, karena saat ini hampir 90 % unfermented.

Potensi

Dirut PT BT Cocoa Indonesia, Sindra Widjaja, berharap, Gerakan Nasional Kakao terus dilanjutkan. Karena gerakan ini baru mencakup 30 % areal tanam kakao. "Jika produktivitas tanaman kakao ti-



Dirut PT BT Cocoa Indonesia, Sindra Widjaja, menerima dokumen serah terima fisik kakao disaksikan Direksi KBI dan JFX serta Pejabat Bappebti

dak dibenahi, Indonesia bisa berubah dari pengekspor menjadi net importir. Faktanya saat ini banyak tanaman kakao yang sudah tua dan terserang hama. Selain itu, kapasitas industri terus naik. Tahun 2014, kapasitas industri kakao nasional diperkirakan mencapai 500.000 ton,” khawatirnya Sindar.

Di sisi lain, Sindra Widjaja mengatakan, dengan perdagangan kakao di JFX, petani akan mulai memproduksi biji kakao fermentasi. Hal ini agar mudah mengontrol harga kakao dunia dan menjadi acuan perdagangan kakao di bursa saham. “Transaksi kakao berjangka membuat kepastian perolehan biji kakao untuk bahan bubuk cokelat. Bahkan bisa melakukan hedging atas gejolak harga,” jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan Sindar, saat ini sudah ada 14 industri pengolahan kakao dan cokelat di Tanah Air. Kapasitas terpasang industri itu meningkat dari 531.675 ton per tahun pada 2010

menjadi 689.750 ton pertahun pada 2011. Hal itu dampak penerapan kebijakan pemerintah pengenaan Bea Keluar (BK) ekspor biji kakao sejak 1 April 2010. “Dampak positif dari BK kakao itu membuat bisnis kakao di dalam negeri semakin marak.”

Hilirisasi

Selama ini, pengusaha lebih banyak mengekspor biji kakao, namun dengan pengenaan BK, jumlah investor yang akan melakukan hilirisasi di bidang pengolahan biji kakao di Indonesia terus bertambah. Menurut Sindar Widjaja, perusahaan pengolah kakao asal Swiss, Barry Callebaut digandeng PT Comextra Majora, yang akan mendirikan pabrik pengolahan biji kakao dengan investasi US\$ 35 juta. Investor lainnya, Archer Daniels Midland Cocoa (ADM Cocoa) asal Singapura, Cargill dari Amerika Serikat, dan JB Cocoa dari Malaysia.

JFX mengklaim, pelaku pasar yang sudah difasilitasinya terdiri dari 69 pelaku, antara lain, pabrik pengolahan coklat, pabrik makanan dan minuman, para pedagang pengumpul, petani dan pengolah lahan kakao, dan sebagainya. Selain itu, tujuan JFX mengeluarkan kontrak berjangka kakao, sebagai antisipasi kebangkitan industri kakao dan cokelat nasional yang semakin berkembang.

Disamping itu, bertujuan untuk price discovery atau pembentukan harga, perdagangan biji kakao adalah untuk memberikan fasilitas hedging (lindung nilai) kepada para pelaku usaha industri kakao nasional. Sehingga, kehadiran perdagangan kontrak berjangka kakao di JFX, diharapkan dapat lebih menggalakan sektor perkebunan kakao beserta industrinya. Dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan devisa negara dan peningkatan daya saing di kancah global. ▲

Kontrak Kakao JFX Berkorelasi Positif



Renji Betari, Analis PT iPasar Indonesia

Salah satu keuntungan pelaku pasar bertransaksi kontrak berjangka kakao di JFX, baik pembeli maupun penjual dapat membuka kontrak pada harga yang berbeda, di waktu yang berbeda, tergantung harga pasar saat itu. Perubahan harga di market menghasilkan profit/loss sesuai dengan selisih harga jual dan harga beli kakao. Pedagang fisik kakao juga dapat melakukan hedging, yakni mengambil posisi kebalikan di pasar berjangka

dari pasar fisik untuk mengunci harga jual atau pun beli. Contohnya, apabila penjual merasa bahwa harga di pasar fisik- spot price terlalu rendah, maka si penjual dapat membuka kontrak beli di pasar berjangka untuk pengiriman tiga bulan atau enam bulan ke depan. Sementara itu, apabila mendekati waktu pengiriman terbukti bahwa harga naik, maka si penjual tadi dapat menjual kontrak kakao tersebut dan mendapatkan profit dari perubahan harga.

Dari pengamatan kami selama bertransaksi kontrak kakao di JFX, pergerakan harga baik saat naik maupun turun, berkorelasi positif antara 80 % hingga 90 % dengan harga kontrak kakao di bursa New York.

Sedangkan perbedaan kontrak kakao JFX dengan bursa luar negeri, margin awal di JFX relatif lebih kecil. Margin awal sekitar Rp 10 juta per lot, dengan margin ditahan sebesar hanya Rp 4,5 juta. Sedangkan di luar negeri, broker asing setoran awal butuh US\$ 5.000 dengan margin ditahan sebesar US\$ 2000 - US\$ 2500.

Di sisi lain, kakao JFX menggunakan batas perubahan harga Rp 1.000 atau sekitar 4 - 5 % naik/turun maksimal dalam sehari, sehingga memperkecil re-

siko untuk spekulasi. Sedangkan di bursa berjangka luar negeri, volatilitas mencapai 8 % atau lebih, pada saat tertentu.

Jadi singkatnya, bertransaksi kakao di JFX lebih efisien. Di samping itu, faktor-faktor fundamental komoditi kakao yang diperdagangkan di pasar global datangnya dari Indonesia. Karena kebun kakao-nya pun ada di Indonesia.

Untuk pengembangan kontrak berjangka kakao JFX, menurut kami pemerintah perlu mendorong seluruh pelaku komoditi kakao untuk menjadikan instrumen perdagangan berjangka sebagai program nasional. Hal itu untuk meningkatkan kesejahteraan petani di daerah, terutama akibat kesenjangan yang terlalu lebar antara kota besar dan kota kecil.

Kalau boleh mengambil pengalaman dari India, bursa berjangka Mumbai Commodity Exchange (MCX) saat ini sudah sangat maju karena pada awal berdirinya pemerintah memaksa agar para pelaku fisik mengambil posisi di bursa. Dengan demikian akan mempercepat terciptanya harga pasar yang efisien, wajar dan dapat dijadikan acuan harga bagi produsen komoditas. ▲



Gubernur Jatim, Soekarno, memberi penjelasan kepada Wapres Boediono di sela-sela PLKA Puspa Agro

Wapres, Boediono;

PLKA Beri Keuntungan Semua Pihak

Penyelenggaraan pasar lelang komoditi agro (PLKA) Puspa Agro ke 93, menjadi bukti kerja keras dan konsistensinya dalam mendukung peningkatan efisiensi perdagangan. Dalam mengapresiasi kegiatan itulah, Wakil Presiden RI, Boediono, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, bersama Gubernur Jawa Timur, Soekarno dan Kepala Disperindag Jatim, Budi Setiawan, melakukan kunjungan ke pasar Induk Puspa Agro Jemundo, Jatim pada 26 Mei 2012, lalu.

"Lanjutkan kegiatan pasar lelang ini, karena keberadaannya sudah memberikan banyak keuntungan semua pihak, terutama petani," kata Boediono antusias, saat menyaksikan proses transaksi jual beli cabai merah besar di pasar lelang agro.

Hal senada juga diungkapkan Soekarno, menurutnya, frekuensi pasar lelang ini akan lebih ditingkatkan. "Rencananya, kegiatan ini akan dilakukan hingga dua kali dalam sebulan. Karena selama ini hanya dilakukan sekali dalam sebulan," kata Soekarno.

Menurutnya, langkah ini sebagai upaya nyata Pemprov Jatim untuk terus memacu perdagangan antar pulau. Berdasarkan data BPS, pada triwulan pertama 2012 atau periode Januari-Maret, perdagangan antar pulau Jatim mencatat transaksi sebesar Rp 84 triliun, naik 13,98 % dibandingkan transaksi pada triwulan pertama 2011 yang mencapai Rp 60 triliun. "Capaian transaksi perda-

ngan antar pulau Jatim kian meningkat, tentunya ada peran pasar lelang di sana," ujar Pakde Karwo, sapaan kental Soekarno.

Sementara itu, Budi Setiawan menjelaskan, keberadaan pasar lelang membuat mata rantai pemasaran lebih efisien, memberikan kepastian harga melalui pembentukan harga yang transparan, membangun dan memperluas jaringan usaha dan terjaminnya penyerahan komoditas sesuai dengan kebutuhan.

"Kita juga terus melakukan sosialisasi terhadap pelaku dunia usaha terkait adanya pasar lelang agro yang telah menjadi agenda rutin. Dampak sosialisasi ini, jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan rutin tersebut terus meningkat. Tentunya, capaian transaksi juga terus meningkat," jelas Budi.

Cabai Rp 9,987 miliar

Tercatat, total transaksi pasar lelang Puspa Agro dari tahun 2003- hingga April 2012, atau dari 92 penyelenggaraannya mencapai Rp 4,96 Triliun. Sedangkan pelaksanaan pasar lelang di Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar 549,5 Miliar, dan pada tahun 2011 total nilai transaksi sebesar Rp. 399,4 Miliar. Penurunan mencapai 27,3% yang disebabkan oleh menurunnya jumlah penyelenggaraan Pasar Lelang pada tahun 2011.

Sementara itu pada proses pasar lelang yang ke 93 dilakukan dalam durasi 6 jam, dengan total transaksi mencapai Rp 29,229 miliar. Untuk 5 besar trans-

aksi komoditasnya yaitu, cabai merah keriting dan cabai rawit yang terserap hingga 754 ton dengan transaksi mencapai Rp 9,987 miliar atau mencapai 34,17 persen dari total transaksi.

Selanjutnya, minuman kesehatan tonik apel mampu terjual 80 ribu liter dengan transaksi Rp 5,6 miliar atau mencapai 19,16 persen dari total transaksi. Disusul kemudian, Komoditas daging sapi segar dan sapi beku juga berhasil terjual 60 ton dengan transaksi Rp 3,27 miliar atau mencapai 11,19 persen dari total transaksi.

Sedangkan Komoditas ayam beku terjual 96 ton dengan transaksi Rp 2,328 miliar atau 7,96 persen dari total transaksi. Diurutan kelima, komoditas apel manalagi terjual 180 ton dengan transaksi Rp 1,760 miliar atau mencapai 6,02 persen dari total transaksi.

Menurut Kepala Bidang PDN Disperindag Jatim, Arifien T. Ariadi, komoditas yang diperdagangkan cukup beragam. Diantaranya, dari hasil pertanian dan hortikultura, seperti beras, jagung, kedelai, kacang hijau, kentang, dan lainnya. Ada juga daging sapi potong, daging ayam dan sebagainya.

"Cabai termasuk komoditas yang diburu, karena harganya yang fluktuatif cenderung naik. Beras juga masih menjadi incaran para pedagang besar khususnya dari Jakarta, Bandung, Semarang dan kota-kota besar di Indonesia. Karena beras sampai saat ini harganya masih fluktuatif meskipun sudah panen," ujar Arifien T. Ariadi. ▲



Puskompas Sinergi PLKA & SRG

Pemprov Sulsel lakukan revitalisasi PLKA dalam upaya mengoptimalkan pemasaran komoditi unggulan yang modern.

Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA) Pemprov Sulawesi Selatan pengelolaannya akan dilaksanakan Koperasi Pusat Komoditi dan Pasar Lelang Agro (Puskompas) Sulsel. Pengelolaan PLKA oleh Puskompas itu dalam rangka revitalisasi pasar lelang yang dibina Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Tujuannya, untuk mengoptimalkan pasar lelang sebagai sarana pemasaran komoditi pertanian yang modern dan profesional. PLKA Sulsel merupakan salah satu pasar lelang yang direvitalisasi Bappebti. PLKA lainnya yakni PLKA Jateng, Jatim, Jabar dan Bali.

Pengelolaan PLKA Sulsel secara resmi dilaksanakan Koperasi Puskompas terhitung sejak 7 Mei 2012, ditandai dengan dilakukannya penandatanganan MoU antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sulsel, dengan pengurus Koperasi Puskompas.

Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, mengatakan, diharapkan Koperasi Puskompas segera melakukan persiapan dan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan. Sehingga pelaksanaan pasar lelang dapat dilaksanakan dengan maksimal.

"PLKA Sulsel memiliki potensi dikembangkan. Karena kita ketahui Sulsel merupakan salah satu sentra komoditi

unggulan. Dan, Sulsel merupakan salah satu pintu keluar komoditi baik untuk tujuan ekspor maupun perdagangan antar pulau," jelas Ismadjaja.

Ditambahkan Ismadjaja, dengan diserahkannya penyelenggaraan pasar lelang Sulsel ke Puskompas, mereka sudah bisa melaksanakan lelang. Namun, tahun ini masih dalam tahap uji coba.

"Puskompas harus lakukan itu agar pengurusnya memiliki pengalaman dan dapat memperbaiki bolong-bolong yang mungkin ditemukan saat penyelenggaraan uji coba. Oleh karena itu kami harapkan Puskompas menawarkan komoditi-komoditi unggulan Sulsel, agar pembeli dan petani bisa lebih fokus," papar Ismadjaja Toengkagie.

PLKA VS SRG

Ketua Koperasi Puskompas, Sudirman Mumba, mengatakan, tahap awal penyelenggaraan pasar lelang akan menyertakan empat jenis komoditi. masing-masing komoditi beras, jagung, rumput laut, dan kakao.

"Uji coba pasar lelang akan dilakukan Puskompas pada akhir Mei 2012, ini, dan hanya difokuskan pada komoditi unggulan Sulsel. Saat ini pun kami sedang lakukan inventarisasi daerah sentra komoditi unggulan yang menjadi peserta pasar lelang," terang Sudirman.

Lebih jauh dijelaskan Sudirman, petani berhak menentukan harga jual komoditi yang ditawarkan melalui Pas-

kompas. Dengan demikian petani dipastikan memperoleh keuntungan dari pasar lelang.

"Selama pasar lelang digelar Puskompas, petani berhak menentukan harga jual komoditinya. Jika harga komoditi rendah, Puskompas akan memasukkannya ke gudang dengan mekanisme sistem resi gudang (SRG). Sehingga, petani tidak dirugikan karena dapat memperoleh modal kerja dari perbankan sambil menunggu harga jual komoditi meningkat," jelas Sudirman Mumba.

Direncanakan, mekanisme lelang yang akan diselenggarakan Puskompas mengadopsi sinergitas antara pasar lelang dengan SRG. Dengan mekanisme itu, pasar lelang merupakan salah satu sarana pemasaran SRG.

Untuk sinergitas antara pasar lelang dengan SRG, Pengurus Puskompas akan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Diantaranya, perbankan sebagai lembaga yang akan menangani kegiatan penjaminan pasar lelang, Pengelola Gudang yang melaksanakan SRG, asosiasi produsen seperti pedagang komoditi beras, jagung, rumput laut dan kakao untuk menentukan standar komoditi yang akan masuk ke gudang SRG dan pasar lelang.

Penyelenggaraan pasar lelang yang akan dilaksanakan oleh Puskompas selama tahun 2012 masih berasal dari APBN (Dana Dekonsentrasi). Penyelenggaraan pasar lelang tersebut akan dilaksanakan sejak bulan Mei - Desember 2012. ▲



Optimis Tapi Harus Realistis

SRG hanya salah satu instrumen pengendali inflasi komoditi pangan, jangan jadikan andalan utama pengendalian Inflasi.



Pengantar. Redaksi **Bulletin Kontrak Berjangka** mendapatkan kesempatan istimewa untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi. Di tengah kesibukannya yang padat di Hari Jumat, 25 Mei 2012, lalu, Bayu Krisnamurthi meluangkan waktu untuk memberikan pandangannya terkait Sistem Resi Gudang (SRG).

Di tahun 2005, saat menjadi Dosen di Institut Pertanian Bogor dengan jabatannya sebagai Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3 -IPB), Bayu sudah terlibat dalam pembahasan SRG. Selanjutnya, ketika menjabat Deputy di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Saat ini, Bayu Krisnamurthi, menjadi Wakil Menteri Perdagangan,

kementerian yang membidangi SRG. Lantas apa pandangannya terhadap SRG? Dan, bagaimana pendapatnya ketika SRG dijadikan salah satu instrumen pengendali inflasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)?

Secara gamblang Bayu mengatakan, “saya ini orangnya optimis, tetapi juga harus realistis.” Lalu dia menganalogikan, “ikan itu memang hebat dan memiliki daya tahan untuk hidup. Tetapi, ikan harus hidup di air. Tidak rasional kalau menyuruh ikan hidup di darat. SRG bagus, tapi ada juga instrumen lain sebagai pengendalian inflasi.”

Selengkapnya perbincangan dengan Wakil Menteri Perdagangan itu, sebagai berikut;

Tanya (T). Menurut Bapak apa saja yang menjadi potensi dari SRG?

Jawab (J). Setidaknya ada tiga poin SRG dipandang memiliki potensi besar untuk membantu terutama sektor pertanian kita. Pertama, sistem ini jelas memiliki perlindungan hukum dengan adanya Undang-undang No. 9 Tahun 2011. Dengan undang-undang itu, maka ada keterlibatan pihak lain, seperti perbankan, lembaga mutu, pergudangan, dan lainnya. Secara keseluruhan pihak-pihak itu sangat membantu memberikan tambahan pendapatan kepada petani. Konteksnya adalah, SRG dapat digunakan petani untuk meningkatkan income melalui pemanfaatan dari fluktuasi harga. Jadi, hal itulah pemikiran awal mengapa SRG itu ada. Kedua, dari sisi konsumen atau pasar. Fluktuasi itu menyebabkan inflasi, dan memberatkan konsumen. Kalau kita bisa stabilkan harga maka bagi konsumen akan menjadi benefit, karena harga bisa lebih stabil, bukan berarti harga rendah, tapi konsumen lebih sensitif pada stabilitas. Caranya, dengan pemanfaatan SRG kepastian pasokan tidak diragukan. Jadi, keterbukaan informasi melalui stok yang ada di gudang, itu akan menenangkan konsumen dan ini sangat penting untuk konsumen.

Ketiga, mau tidak mau harus kita akui keberadaan tengkulak. Dan jangan terburu-buru menghakimi tengkulak, karena peranan mereka sebagai risk taker dan juga sebagai service provider. Kebutuhan

menggunakan jasa tengkulak, sebagai konsekuensi karena tidak adanya service yang lain. Tapi memang, tengkulak atau istilah bahasa yang lebih buruk lagi disebut ‘lintah darat’ sangat eksploitatif, interest rate-nya bisa sampai ratusan persen, bahkan sebenarnya sangat unbelievable- tidak bisa diterima akal. Mereka bisa melakukan itu, karena petani dan masyarakat pedesaan dimensi bisnisnya cash flow, sangat jangka pendek. Ini memang harus dipahami, situasinya memang demikian. Oleh karena itu, saya selalu mendorong, harusnya SRG bersamaan dengan gadai komoditi. Jadi dengan dua instrumen itu, petani punya alternatif, walaupun nantinya petani akan datang ke tengkulak, ya tidak masalah, namanya juga hubungan sosial. Tetapi dengan adanya pembandingan, petani punya referensi dan alternatif. Ini saya kira yang menjadi arti strategis dalam SRG.

(T). Menurut Bapak, apakah gadai komoditi bisa dijadikan grade kedua setelah SRG?

(J). SRG dengan gadai bedanya sangat tipis. Perbedaannya adalah, SRG ada peran bank, investor SRG atau pengelola gudang bukan pemilik uang, dia hanya penjual jasa SRG, uangnya datang dari bank, makanya yang dihitung adalah bunga. Tapi kalau gadai, pegadaianya yang punya duit, kemudian masalah transaksi dari nilai barangnya, itu menjadi kesepakatan antara pedagang dengan pemilik. Itu prinsipnya

“SRG sampai diangkat mencapai level setinggi itu. Kita tentu semangat dan optimis, antusias bahwa SRG diposisikan begitu bagus. Tapi di sisi lain, kita juga harus realistis untuk mengatakan sejauh mana peran yang dapat diberikan SRG mengendalikan inflasi.”





yang paling mendasar. Dengan demikian, Kalau saya tidak akan mengatakan first grade atau second grade tapi alternatif saja, instrumen mana yang mau dipakai. Sebelum duduk di Kemendag, saya sering mengatakan, harusnya kita punya menu fasilitas perdagangan yang lengkap dan banyak. Maka pelaku itu boleh memilih dan memanfaatkan alternatif instrumen mana yang hendak dipakai. Ada instrumen SRG, ada lelang komoditi, ada bursa berjangka, ada gadai komoditi, sampai kaitannya dengan pembiayaan, misalnya, leasing, kredit, dan seterusnya. Inilah tantangannya, menyediakan menu yang lengkap.

(T). Bagaimana tanggapan Bapak terhadap Rakornas Ke III TPID, lalu, yang memasukkan SRG sebagai salah satu instrumen pengendali inflasi komoditi pangan?

(J). Sangat surprise! SRG sampai diangkat mencapai level setinggi itu. Kita tentu semangat dan optimis, antusias bahwa SRG diposisikan begitu bagus. Tapi di sisi lain, kita juga harus realistis untuk mengatakan sejauh mana peran yang dapat diberikan SRG mengendalikan inflasi. Memang salah satu tujuan adanya SRG, dan harus selalu kita dorong penggunaannya, untuk meredam fluktuasi harga di tingkat konsumen. Tapi saya juga mengingatkan, jangan SRG menjadi andalan utama untuk pengendalian inflasi, karena tidak cukup hanya SRG. Juga harus ada instrumen lain yang akan berfungsi efektif dengan karakteristik tertentu.

(T). Dalam Rakornas tersebut, Bapak mengatakan akan ada Rakor Teknis SRG, apa yang menjadi pertimbangannya?

(J). Poinnya, saya mau mengatakan apa yang dapat kita (Kementerian Perdagangan) bantu dalam pengendalian inflasi melalui SRG. Tapi pada saat yang sama, mari kita promosikan SRG ini sebesar-besarnya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk komoditi lain. Maka saat Pemda Sulawesi Utara meminta komoditi kopra dan cengkih untuk di SRG-kan, Jambi dengan karetinya, silahkan masuk saja dulu walaupun tidak ada hubungannya dengan inflasi.

(T). Bagaimana agar SRG ini dapat berjalan efektif sebagai pengendali inflasi?

(J). Pertama, masalah fluktuasi harga, harus ada spread yg cukup jelas antar waktu yang memungkinkan orang dapat mendapatkan untung dari bisnis SRG. SRG ini bisnis 'loh, jadi harus ada spread. Dan spread itu harus lebih besar dari cost yang harus ditanggung di dalam SRG. Dan kalau spread harganya masih lebih rendah dari cost-nya, ya tidak berjalan. Kita harus fair menilai hal itu. Kedua, salah satu yang paling mendasar terkait karakteristik komoditi yang di SRG-kan yaitu, komoditi itu keluar masuknya sama atau kalau pun berbeda, perbedaan itu diterima oleh petani atau orang yang mau memanfaatkan fasilitas ini. Artinya, susutnya komoditi, terjadi perubahan fisik atau apa pun, dapat diterima pasar. Jadi, tidak semua komoditi bisa memakai SRG, harus dikombinasi antara waktu dengan kara-

teristik dengan komoditi. Ketiga, sebenarnya banyak diantara komoditi-komoditi yang tidak ada hubungannya dengan inflasi tetapi di tingkat konsumen menjadi berpengaruh pada inflasi. Misalnya komoditi kopi, kakao, rotan, karet dan lain-lain. Ketika harga komoditi itu berfluktuasi di hulu, maka di tingkat konsumen akan berdampak. Jadi, ini yang harus kita pahami. Dengan tiga argumen itu saja, saya ingin membuat catatan bahwa SRG ini sangat bagus dan bisa dipergunakan sebagai salah satu tools dari pengendalian inflasi. Tetapi kita harus paham bahwa ada konsekuensi dan karakteristik yang harus kita sesuaikan terkait dengan SRG, tidak bisa untuk semua.

(T). Menurut Bapak, apa yang menjadi tantangan SRG?

(J). Masyarakat tidak mengerti akan menu ini, sehingga mereka tidak tertarik untuk memanfaatkannya. Selain itu, mereka juga tidak akan produktif. Jadi perlu terus menerus berkomunikasi dengan pelaku, itu menjadi sesuatu yang fundamental dari keberhasilan kita dalam menjalankan instrumen ini.

(T). Bagaimana strategi untuk mengembangkan SRG?

(J). Pertama, menurut saya di Bappebti harus ada pusat atau unit khusus untuk mengelola SRG. Peran penting yang harus didorong dari unit itu adalah informasi harga dan perilaku pasar. Perlu diingat, SRG itu instrumen untuk memanfaatkan fluktuasi, jadi esensial dari pemanfaatan SRG ini yaitu mengenai informasi fluktuasi harga. Akan sulit jika itu tidak ada, karena tidak semua petani atau pelaku usaha paham dan punya informasi harga, jadi kita yang harus menyediakannya. Kedua, salah satu nyawa SRG adalah kualitas, maka diperlukan kejelasan informasi kualitas komoditi tersebut. Selanjutnya, yaitu fasilitas fisik dan fasilitasi kelembagaan.

(T). Apakah unit tersebut harus terpisah dari Bappebti?

(J). Unit SRG itu tetap harus ada di Bappebti. Dengan adanya di Bappebti, salah satu yang kita bisa manfaatkan dari SRG adalah bursa berjangka. Karena fluktuasi gunanya akan lebih rendah kalau sifatnya hanya past tense. Dia akan bagus dan mempunyai manfaat besar kalau ini bisa kita posisikan sebagai future tense. Makanya kemudian forward menjadi penting, karena itu akan mencerminkan ekspektasi harga di masa yang akan datang.

(T). Apa strategi menggairahkan SRG sehingga menarik bagi kalangan swasta?

(J). Kita harus paham bahwa SRG ini datang belakangan, sedangkan maturity dari bisnis komoditi di Indonesia sudah cukup tinggi, jadi kita lead comer dalam konteks memfasilitasi berbagai permasalahan. Jadi, hemat saya kita harus bisa memberikan intensif yang lebih, kita perlu menonjolkan apa 'sih keuntungan yang diperoleh dengan SRG ini. Jadi jangan menghimbau ini adalah program pemerintah, ini adalah sesuatu yang akan membuat anda untung, itu yang bisa kita tunjukkan. Kalau saya hitung-hitung, keuntungan SRG hanya sekitar 5 % dalam waktu 3 bulan, tentu semua cost sudah di cover. Jadi itu yang harus kita tanyakan sama swasta, cukup menarik 'kah keuntungan 5 % bagi mereka? Atau dibalik, kalau anda pakai SRG anda akan dapat 5 % dalam 3 bulan, kalau anda tidak pakai SRG anda akan lose 15 %. Jadi saran saya menawarkan SRG kepada pihak swasta, maka pakai bahasa bisnis. Jangan pakai bahasa regulasi.

(T). Dari kacamata Bapak, bagaimana dukungan instansi terkait terhadap SRG?

(J). Undang-undang SRG milik republik ini. Jadi harusnya semua pihak memberi perhatian dan mengambil peran sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Jadi SRG ini harusnya juga menjadi instrumen oleh teman-teman non Kementerian Perdagangan. Kalau yang mendorong SRG ini hanya Kementerian Perdagangan, SRG tidak akan berkembang. Tapi kalau misalnya seluruh jajaran koperasi menggunakan SRG dan seluruh teman-teman di pertanian menggerakkan petani untuk menggunakan SRG, maka SRG akan lebih berkembang seperti yang diharapkan. ▲





Agenda Foto



Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono memberi arahan dan membuka RAKORNAS III TPID 2012. Jakarta, 16 Mei 2012.



Menko Perekonomian, Hatta Radjasa, memimpin RAKORNAS III TPID 2012, pada rapat tersebut diputuskan SRG sebagai salah satu instrumen pengendali Inflasi. Kepala Bappebti Syahrul R. Sempurnajaya juga menjadi salah satu narasumber dalam diskusi RAKORNAS III TPID 2012. Jakarta, 16 Mei 2012



Kepala BAPPEBTI Syahrul R. Sempurnajaya memberi arahan sekaligus membuka Penataan dan Penyegera Wakil Pialang Berjangka. Yogyakarta 4-5 Mei 2012.



Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, menyampaikan sambutan mewakili Kepala Bappebti pada acara serah fisik kontrak kakao JFX. Sebelumnya, Dirut JFX, Made Soekarwo memberi laporan terkait dengan serah terima fisik kakao. Makassar, 14 Mei 2012.



Sekertaris Disperindag Sulsel, Suwiknyo memberi sambutan dalam acara serah terima fisik kakao JFX. Di sisi lain, Dirut PT. BT Cocoa Indonesia, Sindra Widjaja, memberi penjelasan tentang kualitas kakao yang diterima dari PT. Core Cocoa Indonesia. Makassar, 14 Mei 2012.



Kabag Humas dan Kerjasama Bappebti, Subagiyo, menjadi salah satu narasumber dalam dialog interaktif di Radio ARH 88,4 FM Jakarta. Dialog interaktif tersebut mengusung tema Unit Pelayanan Perizinan Kementerian Perdagangan. Jakarta, 11 Mei 2012.

Polda DIY Ungkap Investasi Bodong

Kepolisian Daerah (Polda) DI Yogyakarta berhasil mengungkap tiga kasus penipuan dengan modus investasi bodong. Dua kasus mirip dengan forex tarding dan satu kasus dengan model investasi emas, uang dan produk-produk lainnya.

Direktur Reskrimsus Polda DIY, Kombes Joko Lelono, dikutip dari detik.com, 14 Mei 2012, mengatakan, kasus penipuan berkedok investasi bodong melalui sistem *online*. Tersangkanya KHT (50 th) sudah ditangkap dan diperiksa. KHT ditangkap di Kemayoran, Jakarta, pada 23 April 2012. "Keterangan yang diperoleh dari KHT, modus investasi itu menggunakan website dengan alamat website Sky East yang berkantor pusat di London, Inggris."

"Tersangka kepada calon investor

selalu mengaku perwakilan Sky East di Indonesia. Terkait itu, kami sudah meminta hosting web di Yogyakarta, untuk memblokir website yang digunakan KHT," kata Joko, di Mapolda DIY, di Ringroad Utara, Depok, Sleman.

Modus yang dilakukan tersangka KHT, jelas Joko Lelono, dimulai dengan melakukan pelatihan gratis kepada calon korban yang berhasil digae. Pelatihan dilakukan di kantor KHT di daerah Gejayan, Sleman.

"Setelah KHT ditangkap, website berubah dengan menyebutkan nomor rekening baru. Nomor rekening yang digunakan Tahapan BCA," kata Joko

Menurut Joko, tersangka juga belum banyak memberi keterangan saat diperiksa, karena mengaku sedang sakit. Namun, masih ada beberapa orang tersangka lainnya yang saat ini masih dikejar.

"Yang jelas, KHT tidak sendirian melakukannya. Tetapi kita belum tahu apakah dia tersangka utama atau masih ada yang lain atau sekedar hanya boneka," beber Joko.

Kasus kedua adalah kasus PT Golden Trust Trading Investment Protection (GTIP), perusahaan ini beralamat di Jln. M.T Haryono, Yogyakarta. Dari hasil penyelidikan Polisi, GTIP mengaku menginduk pada PT Megah Surya Kencana, Surabaya. GTIP kepada calon investor menawarkan keuntungan tetap berkisar 10 - 20 %.

Direktur Reskrimsus Polda DIY, Kombes Joko Lelono, kepada warga Yogyakarta menghimbau untuk lebih berhati-hati memilih sarana investasi. Karena beberapa waktu lalu Polda DIY juga berhasil ungkap kasus sama yang dilakukan PT Cahaya Forex. ▲

JFX Pepet Pojok Bursa BEI di UTY



Jakarta Futures Exchange (JFX) kerjasama dengan Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) menghasilkan SDM yang handal di bidang perdagangan berjangka komoditi. Kerjasama itu diwujudkan dengan mendirikan pojok bursa berjangka di lingkungan kampus UTY. Semenetera itu, JFX menunjuk perusahaan pialang PT Megah Tama Berjangka (MTB), yang berkantor cabang di Kota Yogyakarta, untuk membimbing kalangan civitas UTY di bidang perdagangan berjangka.

"JFX mendirikan pojok bursa berjangka di UTY karena telah ada juga pojok bursa saham dari Bursa Efek Indonesia. Jadi, dengan berdirinya Pojok Bursa JFX akan ada alternatif lain bagi mahasiswa UTY untuk menggali pengetahuan di bidang perdagangan berjangka," demikian antara lain diutarakan Direktur JFX, Roy Sembel, di Yogyakarta, 04 Mei 2012.

Peresmian Pojok Bursa JFX di UTY, itu, dihadiri antara lain Rektor UTY, Bambang Hartadi, Wakil Rektor Bid. Akademik UTY, Tri Gunarsih dan Kepala Cabang MTB, Roy Peterson.

Kita harapkan dengan dua pojok bursa ini, tambah Roy Sembel, akan lahir SDM yang handal di bidang investasi efek dan komoditi. "Kita harapkan pojok bursa ini menjadi tempat untuk studi dan untuk bertransaksi bursa berjangka khususnya di wilayah Yogyakarta. JFX akan menyediakan fasilitas untuk keperluan tersebut, termasuk mengirim tenaga dari Jakarta ke kampus UTY apabila diperlukan."

Rekor UTY, Bambang Hartadi, mengatakan, terpilihnya UTY menjadi tempat pertama berdirinya Pojok Bursa JFX di Yogyakarta, akan menambah fasilitas studi bagi seluruh civitas akademika. "Hal Ini pun akan mendukung komitmen UTY dalam menjadikan bangsa yang berbasis pegetahuan." ▲



Transaksi Multilateral BKDI Capai 49,8 %

PT Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI) pada kuartal pertama tahun 2012, ini, mencatatkan transaksi multilateral meningkat 49,8 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Bahkan, dibandingkan dengan total volume transaksi sepanjang 2011 sebesar 872.825 lot, periode ini sudah mencapai 34,83 %, yakni sebesar 304.071 lot. Peningkatan volume transaksi kuartal pertama tahun 2012, itu, antara lain didorong adanya tambahan kontrak berjangka komoditi seperti OLEINTR yang dirilis pada 09 Desember 2011, dan perdagangan fisik komoditi timah (INATIN) pada 02 Februari 2012.

Direktur Utama BKDI, Megain Widjaja mengatakan, masyarakat investor makin bergairah menggandakan transaksinya berkat edukasi dan sosialisasi perdagangan berjangka komoditi yang

semakin aktif dilakukan BKDI.

“Peningkatan volume transaksi BKDI tersebut seiring dengan semakin pentingnya peran bursa berjangka bagi pelaku usaha dalam melakukan lindung nilai. Di samping itu, bursa berjangka menjadi salah satu sarana investasi yang aman bagi masyarakat,” papar Megain.

“Dengan meningkatnya volume transaksi hingga April ini, kami optimis bisa mengembangkan industri ini. Awalnya, kami menargetkan total volume transaksi BKDI sebesar 1 juta lot. Tetapi dengan pencapaian ini, kami optimis volume transaksi BKDI tahun 2012 menembus angka 1 juta lot,” ujar Megain Widjaja.

Serah Fisik

PT. Identrust Security International (ISI) sebagai lembaga kliring BKDI pada 27 Januari 2012, lalu, juga diketahui menyelenggarakan serah fisik emas sebanyak 2 lot dengan nilai

Rp 250,65 juta. Serah fisik emas tersebut dilaksanakan di PT Aneka Tambang Tbk.

Selain kontrak berjangka komoditi emas, ISI juga melaksanakan serah fisik komoditi OLEIN pada bulan Maret 2012 sebanyak 66 lot atau sebesar 660 ton. Serah fisik olein dilaksanakan dalam dua tahap, yakni pada 12 Maret 2012 sebanyak 44 lot dan 15 Maret 2012 sebanyak 22 lot.

Perdagangan fisik komoditi timah yang diselenggarakan BKDI dengan kode perdagangan INATIN, pada bulan Februari 2012, lalu, juga dilakukan serah fisik sebesar 35 ton. Serah fisik timah tersebut terjadi dua periode, pada 1 Februari 2012 sebesar 2 lot atau 10 ton di level harga US\$ 24.500 per ton. Kemudian, 8 Februari 2012 sebanyak 5 lot setara 25 ton dengan posisi harga US\$ 24.600. Serah fisik komoditi timah tersebut dilaksanakan di gudang eksportir Mentok, Bangka Belitung. ▲

Laba Bersih JFX Tahun 2011 Melonjak 34,5 %

Laba bersih JFX untuk tahun 2011 melonjak 34,5 % dibandingkan dengan tahun 2010. Kenaikan laba bersih tersebut didukung oleh peningkatan laba usaha perseroan yang naik sebesar 36,2 % di tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya. Walau pun di tahun 2011 JFX menanggung beban ekstra, namun perseroan mampu membukukan kenaikan laba bersih.

“Pada tahun 2011, lalu, kami melakukan sejumlah investasi, antara lain pengembangan sistem IT, perpindahan

kantor baru dan sejumlah peningkatan pada program sosialisasi dan edukasi,” papar Dirut JFX, Made Soekarwo.

Laba bersih JFX itu dilaporkan Made Soekarwo dengan jajaran direksi lain kepada para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2012 yang digelar pada 16 Mei 2012 di Kantor JFX, The City Tower Building, Jl. MH Thamrin, Jakarta. RUPST itu juga mengesahkan laporan keuangan perseroan 2011 yang telah diaudit KAP Kosasih, Nurdyaman, Tjahjo dan Rekan (Crowe Horwath). ▲





Coffee nerds AS Order 70 Kontainer Kopi Indonesia

Komoditi kopi asal Indonesia dipesan konsumen di Amerika Serikat hingga 70 kontainer atau setara sekitar US\$ 8 juta. Pesanan kopi asal Indonesia itu terjadi saat para pengusaha kopi Indonesia ikut serta dalam ajang Annual Exposition Specialty Coffee Association of America (SCAA), di Oregon, Amerika Serikat, 20-22 April 2012, lalu. Ajang tahunan SCAA ini, antara lain dihadiri negara produsen kopi seperti Brazil, Costa Rica, El Salvador, Ethiopia, Guatemala, Honduras, India, Kenya, Meksiko, Peru, Puerto Rico, dan Uganda.

Atase Perdagangan Washington

DC, Ni Made Ayu Marthini, mengatakan, partisipasi Indonesia dalam SCAA 2012 itu diharapkan dapat lebih mengenalkan kopi Indonesia kepada masyarakat AS. Sehingga ekspor kopi Indonesia ke Amerika juga dapat terus meningkat.

Di SCAA itu, eksportir kopi nasional memamerkan sejumlah kopi spesial, seperti kopi asal Toraja, Mandailing, Java Preanger, Flores, Bali Kintamani, Papua Jayawijaya. Dan, tidak ketinggalan kopi luwak yang namanya sudah mendunia.

Menurut Marthini, pemesanan kopi berupa trial and fix order didominasi oleh kopi arabica dari Toraja, Mandailing dan Papua. "Kopi jenis arabica asal

Papua saat ini banyak diminati para penikmat kopi di Amerika. Tahun 2011 lalu, kopi Papua mendapatkan pesanan dari pengimpor Amerika sebesar 12 kontainer setiap tahun."

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2011, total ekspor kopi mencapai US\$ 326 juta. Nilai ekspor kopi itu naik sekitar 38 % dari tahun 2010. Sementara itu, di bulan Januari 2012, ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat sudah mencapai US\$ 33,3 juta. Nilai tersebut naik signifikan sebesar 68 % dari periode yang sama tahun 2011. ▲

5 Tahun Mendatang Demand Karet 10 juta ton

Komoditi karet Indonesia akan menjadi komoditi yang diunggulkan setelah CPO- crude palm oil. Hingga saat ini kualitas karet alam di Indonesia masih sangat baik. Hingga 5 tahun mendatang, demand karet alam bisa mencapai 10 juta ton.

"The next primadona Indonesia adalah komoditi karet. Kalau harga minyak naik, karet sintetis pasti akan mahal. Jadi, industri akan lari ke substitusi karet sintetis yaitu karet alam. Dan kita unggul pada karet alam," jelas Guru

Besar Unila, Bustanul Arifin, baru-baru ini.

Pemerhati bidang pertanian ini juga mengatakan, komoditi karet Indonesia unggul namun tidak dibarengi dengan produktivitas petani. Para petani karet terlalu cepat puas dengan pencapaiannya. "Mereka sudah merasa cukup dengan pencapaian yang diperoleh. Pada hal tuntutan pasar global perlu peningkatan produktivitas."

Menurut Bustanul, permintaan karet dunia akan semakin meningkat di masa mendatang. Tahun 2012, ini, diperkirakan permintaan karet mencapai

3 juta ton. Sedangkan produksi karet Indonesia hanya mencapai 2 juta ton.

"Saya hitung-hitung, 5 tahun mendatang demand karet bisa mencapai 10 juta ton. Kalau Indonesia tidak segera memperbaiki peningkatan produktivitas karet alam, siapa yang mampu mencapai high demand seperti itu?" papar Bustanul.

Karena itu, pemerintah harus mendampingi petani memberi penyuluhan, memudahkan peroleh kredit untuk ekspansi lahan dan peremajaan tanaman karet yang sudah tua. ▲

Rumput Laut Sasar Pasar Korsel

Komoditi rumput laut salah satu dari produk hasil laut Indonesia mendapat perhatian komunitas bisnis Korea Selatan (Korsel). Komoditi rumput laut Indonesia berpotensi untuk dikembangkan industri makanan olahan Korsel menjadi lebih dari 700.000 ton. Hal itu terungkap pada seminar bisnis bertema "Market Opportunity of Indonesian Marine Products In Korea" yang diselenggarakan di Yeosu, Korea Selatan, pada 21

Mei 2012, lalu.

Direktur Pengembangan Promosi dan Citra, Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Pradnyawati, mengatakan, ekspor produk hasil laut Indonesia pada Januari 2012 sebanyak 67.214 ton dengan nilai US\$ 214.516.

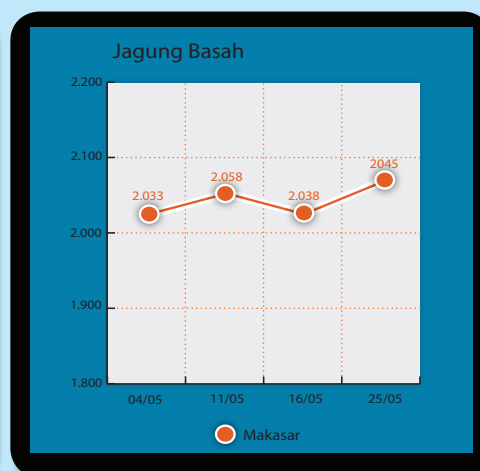
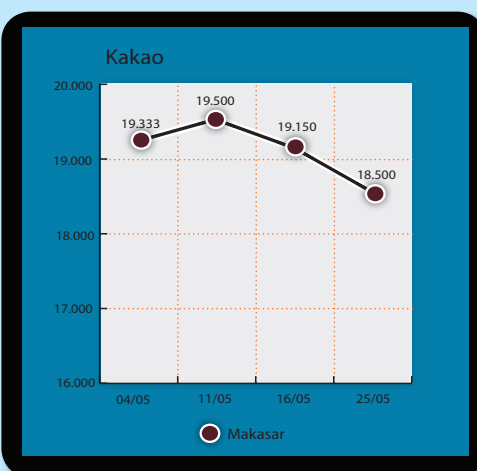
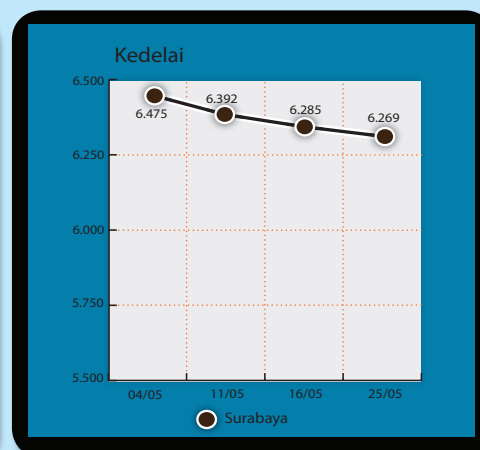
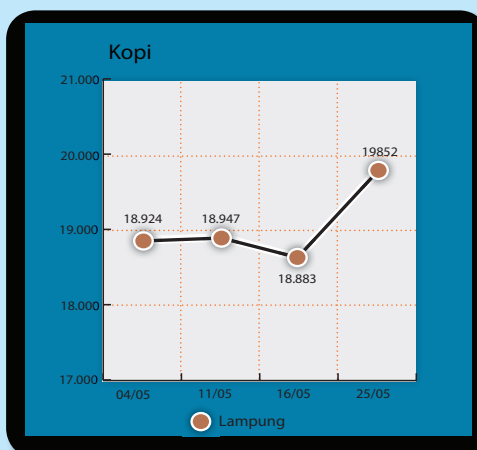
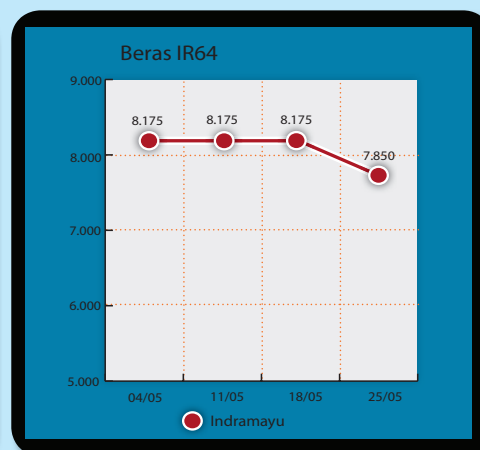
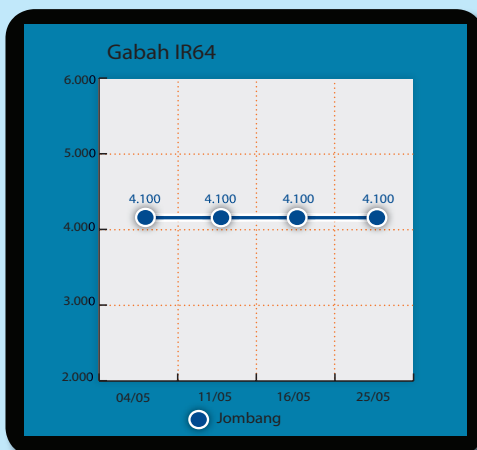
"Dengan total nilai ekspor produk hasil laut sebesar itu, Korsel berada di peringkat ke-9 dengan volume sebesar 2.386 ton setara US\$ 4,936. Sebagian besar dari produk hasil laut Indonesia diekspor ke Thailand, China, Jepang,

Amerika Serikat, dan Vietnam," jelas Pradnyawati.

"Investor Korsel semakin tertarik untuk mengambil bagian dalam program pembangunan ekonomi Indonesia. Investasi dari perusahaan-perusahaan besar seperti POSCO, Han Kook Tire dan CJ Group menjadikan Korsel berada di peringkat ke-7 dengan nilai investasi terbesar di Indonesia. Menjamurnya Lotte Hypermarket di Jakarta hanyalah satu bentuk nyata meningkatnya interaksi ekonomi di antara negara," jelas Pradnyawati. ▲



Harga Komoditi (Rp/Kg)





Minyak Kacang Warisan Dunia

Kacang tanah merupakan jenis tanaman polong-polongan dari famili fabaceae yang merupakan jenis tanaman tropika. Namun dalam pernyebarannya, tumbuhan ini mampu hidup di daerah yang beriklim subtropis.

Kacang tanah diyakini berasal dari Amerika Selatan, tepatnya dari Brazil. Kemudian berkembang ke negara-negara Asia dibawa para saudagar Eropa. Konon, budidaya tanaman ini pertama kali dilakukan suku-suku Indian. Hal itu dikarenakan di suatu masa terjadi paceklik, sehingga kacang tanah menjadi sumber bahan makanan pokok.

Masyarakat Indonesia mengenal tanaman kacang diperkirakan sejak abad ke-17, melalui pedagang-pedagang Spanyol, Cina, dan Portugis sewaktu melakukan pelayarannya dari Meksiko ke Maluku. Jadi, diperkirakan dari negeri Saparua inilah kacang tanah menyebar ke seluruh pelosok negeri.

Negara-negara produsen kacang tanah yang dikenal di dunia antara lain India, China, Nigeria dan Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia budidaya kacang banyak dijumpai di Pulau Jawa, Sumatera Utara dan Sulawesi. Bagi masyarakat Indonesia, kacang tanah memiliki nama atau sebutan yang berbeda-beda, seperti kacang una, kacang jebrol, kacang Bandung, kacang tuban, kacang kole.

Dari ekstrak biji kacang, dapat diolah menjadi minyak nabati kacang tanah. Minyak ini sudah dikenal lama yang sering digunakan oleh masyarakat China, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Menurut sejarah, orang Tiongkok kuno atau tepatnya pada masa dinasti Qing (1644-1911), minyak ini sudah digunakan untuk menggoreng makanan. Sedangkan dalam budaya India, tepatnya masyarakat India Barat dan Utara, terbiasa menggunakan minyak kacang tanah dalam pembuatan bumbu kari

dalam menghidangkan sayuran.

Dalam pemanfaatan sebagai bahan pangan, minyak ini dapat digunakan sebagai minyak goreng, bahan dasar pembuatan margarin, mayonnaise, salad dressing, dan mentega putih. Aroma dan rasa minyak ini sangat khas, sehingga makanan hasil gorengannya, akan lebih sedap dan dinikmati. Keunggulan lainnya, minyak kacang dapat dipakai berulang-ulang untuk menggoreng bahan pangan.

Minyak ini juga memiliki titik asap yang tinggi, yang menunjukkan kualitasnya sangat baik digunakan untuk menggoreng. Titik asap merupakan titik ketahanan minyak goreng terhadap panas. Minyak goreng dengan titik asap tinggi takkan mengubah lemak tidak jenuh (lemak baik) menjadi lemak jenuh (lemak jahat) saat digunakan.

Untuk dijadikan salad dressing yang disimpan di bawah suhu - 11 celsius, minyak ini ternyata lebih baik dari minyak jagung, minyak biji kapas, minyak olive, dan minyak bunga matahari. Hal ini disebabkan karena jika minyak kacang tanah berwujud padat akan berbentuk amorf, dan lapisan padat tersebut tidak pecah sewaktu proses pembekuan.

Selain itu, minyak kacang tanah juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri kosmetik, seperti sabun, pencuci rambut, dan lainnya. Sedangkan dalam bidang farmasi, juga digunakan sebagai bahan campuran obat asma, pembuatan adrenalin, dan lainnya.

Biodisel

Tak hanya itu, minyak kacang juga sudah dikenal sebagai salah satu sumber bahan bakar biodiesel. Di tahun 1900, pada sebuah pameran di Paris, salah satu perusahaan mobil negeri mode ini mempertontonkan bahwa minyak kacang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar untuk mesin diesel. Dari sisi kandungan, minyak

kacang tanah mengandung 76-82 % asam lemak tak jenuh yang terdiri dari 40-45 % asam oleat dan 30-45 % linoleat. Asam lemak jenuh sebagian besar terdiri dari asam palmitat, sedangkan kadar asam miristat sekitar 5 %. Kandungan minyak dalam kacang tanah cukup tinggi, yaitu sekitar 40-50 % dan merupakan minyak nabati yang bebas kolesterol.

Menurut data United States Department of Agriculture (USDA), dari seberat 100 gram minyak kacang mengandung 17.7 gram lemak jenuh, 48.3 gram lemak tak jenuh tunggal, dan 33.4 gram lemak tak jenuh ganda.

Sementara itu, data Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan, produksi minyak kacang tanah di tahun 2003 mencapai sekitar 10 % dari pasaran minyak nabati dunia.

Industri minyak kacang tanah di Indonesia sudah dikenal sejak lama, tetapi perkembangannya belum seperti industri minyak kelapa sawit. Biasanya, produsen di tanah air hanya dalam skala kecil - home industri. Umumnya, produk minyak kacang dikemas dengan menggunakan botol kaca yang berwarna gelap. ▲





Sehat Alami Ala Kacang Tanah

Manfaat mengonsumsi minyak kacang, ternyata khasiatnya sepadan dengan mengonsumsi kacang segar. Seperti diketahui dari beberapa penelitian, kacang tanah kaya dengan lemak, mengandung protein yang tinggi, zat besi, vitamin E dan kalsium, vitamin B kompleks dan fosforus, vitamin A dan K, lesitin, kolin dan kalium.

Tingginya kadar lemak pada kacang, tidak perlu dikhawatirkan. Karena, hampir 80 % dari lemak tersebut merupakan asam lemak tidak jenuh. Sangat baik menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL), tanpa mempengaruhi kolesterol baik (HDL). Kandungannya, terdiri dari Omega 3 yang merupakan lemak tak jenuh ganda dan Omega 9 yang merupakan lemak tak jenuh tunggal.

Untuk vegetarian, kacang tanah menjadi andalan sebagai pengganti daging. Sebabnya, kandungan protein dalam kacang tanah jauh lebih tinggi dari daging, telur, dan kacang soya. Penelitian yang dilakukan University of Guelph-Ontario, Kanada, kacang tidak hanya kaya akan protein, tetapi mengandung antioksidan atau penjinak radikal bebas yang diyakini sanggup melindungi tubuh dari serangan kanker, gangguan jantung, dan juga gangguan penyakit lainnya.

Sedangkan penelitian Universitas Purdue, Amerika Serikat, dengan konsumsi teratur kacang tanah, dapat menurunkan kadar trigliserida dan memperbaiki kualitas diet melalui peningkatan asupan zat-zat yang dikenal dapat memberi perlindungan dari penyakit jantung seperti magnesium, folat, vitamin E, tembaga, arginin, dan serat.

Mitos

Kacang tanah juga mengandung asam amino yang tinggi dan untuk ibu yang menyusui, sangat bagus menambah kandungan air susu. Sementara, kacang juga bisa untuk melancarkan pencernaan, karena kacang menjadi sumber terbaik pencuci perut.

Dr. Frank Hu dari Harvard School of Public Health, dari penelitiannya terhadap 86.000 wanita yang sering mengonsumsi kacang menunjukkan, kacang-kacangan termasuk kacang tanah mampu menjaga aktivitas pemompaan jantung dengan teratur.

Adanya persepsi masyarakat bahwa kacang menyebabkan timbulnya jerawat, hal ini ternyata hanya mitos saja, karena timbulnya jerawat karena adanya timbunan minyak yang berlebih dan kebersihan kulit yang tidak terjaga. ▲

Tips Kecantikan Ala Kacang Tanah

-Mengobati jerawat

Campurkan 1 sendok teh minyak kacang tanah dan 1 sendok teh air jeruk nipis. Bubuhi pada kulit wajah yang telah dicuci sebelumnya, diamkan selama 10 menit dan bilas dengan air hangat. Anda dapat menggunakannya setiap hari agar komedo tidak tumbuh di wajah Anda.

-Diet rendah kolesterol

Konsumsi minyak kacang tanah dalam jumlah terbatas, yaitu 1 sendok makan per hari secara rutin.





PERSYARATAN CALON PENERIMA SUBSIDI SRG

Pengantar; Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2009, tentang Skema Subsidi Sistem Resi Gudang (S-SRG) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 66/M-DAG/Per/12/2009, tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Sistem Resi Gudang, menentukan syarat dan pihak-pihak yang berhak menerima subsidi bunga bank dalam pembiayaan SRG. Sesuai dengan Permenkeu tersebut, pihak-pihak yang berhak menerima S-SRG adalah Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi.

Sedangkan tujuan diberikan S-SRG itu untuk memfasilitasi penerima memperoleh pembiayaan dari bank pelaksana. Berdasarkan Permenkeu itu, juga diatur bank atau lembaga keuangan bukan bank pelaksana pembiayaan SRG. Hingga saat ini bank yang ditentukan pelaksana pembiayaan S-SRG, masing-masing BRI, BPD Jabar Banten, BPD Jatim, BPD Jateng dan BPD Kalsel.

Lebih rinci persyaratan pihak penerima S-SRG dijabarkan di bawah ini;

Pihak yang dapat menerima S-SRG meliputi:

- Petani
- Kelompok Tani
- Gabungan Kelompok Tani
- Koperasi.

Petani yang akan menerima S-SRG, harus berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dan menyerahkan persyaratan:

- kartu identitas diri; dan
- surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan sebagai Petani dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Kelompok Tani yang akan menerima S-SRG, melalui ketua yang ditunjuk harus menyerahkan persyaratan:

- surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan sebagai Kelompok Tani dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah jika Petani yang bersangkutan berdomisili dalam satu Desa atau Kelurahan atau oleh Camat jika Petani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Desa dalam satu Kecamatan atau oleh Dinas Instansi terkait jika Petani yang bersangkutan berdomisili di beberapa kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota;
- susunan pengurus Kelompok Tani yang aktif paling sedikit terdiri dari

ketua dan sekretaris/bendahara; dan

- surat kuasa dari anggota Kelompok Tani yang menunjuk Ketua Kelompok dari anggota.

Gabungan Kelompok Tani yang akan menerima S-SRG, melalui ketua yang ditunjuk harus menyerahkan persyaratan:

- surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan sebagai Gabungan Kelompok Tani dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah jika Kelompok Tani yang bersangkutan berdomisili dalam satu Desa atau Kelurahan, atau oleh Camat jika Kelompok Tani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan atau oleh Dinas Instansi terkait jika Kelompok Tani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota;

- susunan pengurus Gabungan Kelompok Tani yang aktif paling sedikit terdiri dari ketua dan sekretaris/bendahara;

- surat kuasa dari anggota Gabungan Kelompok Tani yang menunjuk Ketua Gabungan Kelompok Tani; dan
- peraturan Gabungan Kelompok Tani yang disepakati oleh seluruh anggota.

Koperasi yang akan menerima S-SRG, melalui ketua harus menyerahkan persyaratan:

- surat pengesahan badan hukum Koperasi dari instansi yang berwenang;
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang memuat kegiatan antara lain kegiatan usaha di sektor pertanian; dan
- daftar anggota yang terdiri dari Petani.





TATA CARA PENGAJUAN S-SRG

- (1) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, atau Koperasi yang akan memanfaatkan S-SRG mengajukan permohonan kredit S-SRG dengan Resi Gudang sebagai agunan kepada Bank Pelaksana/LKNB disertai dengan dokumen lain yang dipersyaratkan.
- (2) Dalam hal permohonan S-SRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, penerima S-SRG harus menandatangani akad kredit beserta seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank Pelaksana/LKNB.
- (3) Jika penerima S-SRG Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani, penandatanganan akad kredit beserta seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani selaku penerima kuasa.
- (4) Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menyalurkan S-SRG dari Bank Pelaksana/LKNB kepada anggotanya.
- (1) Ketua Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), menyalurkan S-SRG dari Bank Pelaksana/LKNB kepada Ketua Kelompok Tani.
- (2) Ketua Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyalurkan S-SRG dari Bank Pelaksana/LKNB kepada anggota Kelompok Tani yang bersangkutan. ▲





Potensi SRG Pembiayaan Sektor Pertanian

Asahri *)

Ketersediaan modal sangat diperlukan bagi pelaku bisnis untuk menjamin kelancaran usahanya, terutama bagi petani serta usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis pertanian. Pelaku usaha jenis ini umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit. Untuk pemberdayaan dan pembinaan kepada petani serta UKM yang berbasis pertanian, Sistem Resi Gudang (SRG) diharapkan akan menjadi salah satu solusi untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditas yang tersimpan di gudang. Selain itu, dampak yang lebih luas dari SRG adalah akan meningkatkan produktifitas dan kualitas produk yang dihasilkan para petani. Selanjutnya, jika SRG dapat diterapkan maka manajemen usaha tani akan lebih tertata karena petani dapat menetapkan strategi jadwal tanam dan pemasarannya.

Potensi manfaat yang dapat diperoleh dengan implementasi SRG relatif cukup besar. Misalnya dalam peningkatan kapasitas sektor pertanian untuk mendukung perekonomian nasional,

SRG dapat memainkan peranan yang signifikan. Menurut BRI (2009), dengan dilaksanakan SRG berpeluang untuk meningkatkan produksi, menambah perputaran ekonomi, dan menyerap tenaga kerja/mengurangi pengangguran.

Di samping itu, dengan SRG diharapkan kontribusi UMK pada pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Kondisi ini hanya dapat dicapai jika ada kemudahan untuk mengakses sumber pendanaan, yang salah satu alternatif dapat disediakan dengan SRG.

Selanjutnya, secara khusus untuk sektor pertanian, menurut BRI (2011) penerapan SRG sangat prospektif untuk meningkatkan pendapatan usaha tani. Melalui SRG akan diperoleh beberapa manfaat melalui: (1) tunda jual, yaitu saat panen raya petani menyimpan hasil pertanian di gudang; (2) penjualan dilakukan pada saat harga komoditas pertanian telah tinggi, serta (3) meminimalisir penimbunan barang oleh pedagang pengumpul. Dengan RG yang dapat digunakan petani akan mendapatkan dana tunai untuk kebutuhan modal usaha maupun untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Manfaat

SRG juga memiliki posisi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di sektor pertanian dengan argumentasi sebagai berikut: (a) RG merupakan salah satu bentuk sistem tunda jual yang menjadi alternatif dalam meningkatkan nilai tukar petani, (b) Di era perdagangan bebas, RG sangat diperlukan untuk membentuk petani menjadi petani pengusaha dan petani mandiri, dan (c) SRG bisa memangkas pola perdagangan komoditas pertanian sehingga petani bisa mendapatkan peningkatan harga jual komoditi.

Keberadaan SRG tidak hanya bermanfaat bagi kalangan petani tetapi juga pelaku ekonomi lainnya seperti dunia perbankan, pelaku usaha dan serta bagi pemerintah. Di antara manfaat SRG tersebut, adalah: (1) Ikut menjaga kestabilan dan keterkendalian harga komoditas, (2) Memberikan jaminan modal produksi karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan, (3) Keleluasaan penyaluran kredit bagi perbankan yang minim risiko, (4) Ada jaminan ketersediaan barang, (6) Ikut menjaga stok nasional dalam rangka menjaga

“ bahwa dari hasil struktur pendapatan usahatani padi, petani yang berpartisipasi di SRG memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan petani non SRG. Dengan demikian, SRG memiliki kemampuan menghasilkan penerimaan tunai yang lebih baik. ”

ketahanan dan ketersediaan pangan nasional, (7) Lalu lintas perdagangan komoditas menjadi lebih terpantau, (8) Bisa menjamin ketersediaan bahan baku industri, khususnya agroindustri, (9) Mampu melakukan efisiensi baik logistik maupun distribusi, (10) Dapat memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah, dan (11) Mendorong tumbuhnya industri pergudangan dan bidang usaha yang terkait dengan SRG lainnya.

Dalam aspek ketersediaan dana, pengembangan SRG sebagai alternatif pembiayaan pertanian dengan dukungan perbankan sangat terbuka. Hal ini didasarkan argumen, sebagai berikut: (1) secara kumulatif potensi pertanian besar, (2) jangka waktu kredit SRG relatif pendek, (3) analisis kelayakan nasabah (4C) dilaksanakan oleh Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), pengelola gudang dan asuransi, serta (4) bank hanya deal dengan dokumen resi gudang.

Dengan beberapa argumen di atas, dapat dikatakan bahwa SRG memiliki prospek yang cukup potensial sebagai alternatif skim pembiayaan di sektor pertanian. Jika skim ini dapat dijalankan secara optimal, maka SRG berpotensi mengatasi kelangkaan uang tunai di tingkat usahatani, petani memperoleh harga lebih baik dan dapat mengakses fasilitas kredit dari bank atau non-bank.

Kelayakan Gudang

Petani sebagai produsen merupakan salah satu simpul utama dari semua stakeholder SRG yang

saling terkait satu dengan lainnya. Jika simpul kritis ini dapat terbantu dengan adanya SRG, maka simpul lainnya juga akan menerima manfaat. Dan, hal itu merupakan faktor kunci keberlanjutan usaha dengan skim RG bagi semua stakeholder.

Perlu digarisbawahi, bahwa potensi dan manfaat SRG akan dapat direalisasi jika didukung dengan perangkat yang memadai. Disadari sepenuhnya bahwa kata kunci dari kesuksesan SRG adalah kelayakan gudang-warehouse ability. Oleh karena itu, pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan telah membangun sejumlah gudang yang memenuhi spesifikasi di beberapa daerah. Data Bappebti 2011 menunjukkan, dari dana stimulus fiskal Departemen Perdagangan dibangun gudang di 34 daerah, dan dari dana APBN-P di 11 daerah, dari DAK 2011 sebanyak 15 unit gudang. Di samping itu, sejumlah gudang potensial milik BUMN PT. Pertani (404 unit), PT. BGR (99 unit), PT. PPI (108 unit), gudang milik koperasi/KUD dan gudang swasta yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dukungan lembaga keuangan juga menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan SRG, baik melalui skim komersial maupun program. Terkait dengan skim program, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No 171/PMK.05/2009, tentang, Skema subsidi SRG. Untuk pelaksanaan skema SRG tersebut, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Perdagangan

No 66/MDAG/PER/12/2009, tentang, Pelaksanaan Skema SRG. Menurut BRI (2011) tujuan dari Skema SRG adalah memfasilitasi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi untuk memperoleh pembiayaan dari bank pelaksana/lembaga keuangan non bank dengan memanfaatkan RG sebagai jaminan/agunan.

Dalam skema ini, beban bunga kepada peserta S-SRG ditetapkan sebesar 6 %. Selisih tingkat bunga S-SRG dengan beban bunga peserta S-SRG merupakan subsidi pemerintah. Subsidi bunga diberikan selama masa jangka waktu paling lama 6 bulan, tidak termasuk perpanjangan jangka waktu pinjaman dan/atau jatuh tempo Resi Gudang.

Hasil kajian empiris dan ilmiah tentang manfaat SRG, terutama untuk petani, masih sangat terbatas. Namun dari studi Kurniawan (2009), di Kabupaten Majalengka tentang SRG, menyimpulkan, bahwa dari hasil struktur pendapatan usahatani padi, petani yang berpartisipasi di SRG memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan petani non SRG. Dengan demikian, SRG memiliki kemampuan menghasilkan penerimaan tunai yang lebih baik. Hasil studi Yudho tahun 2008, juga menunjukkan SRG cukup efektif dan memberikan manfaat lindung nilai bagi petani. Biaya untuk RG masih lebih rendah dibandingkan penerimaan yang diterima dengan mengikuti SRG. *) Pusat Studi Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, www.pustaka.litbang.deptan.go.id ▲





The World Bank Reviewed Indonesian PBK

The World Bank gave big attention towards Indonesian Futures Trading Industry development. In regards to this The World Bank sent 2 delegations to Coftra on the 19th of April 2012, they are Fei Ming as Private Sector Specialist East Asia and Pacific Region and Kiyoshi Taniguchi as economist.

The arrival of the world bank delegations was welcomed by the head of coftra commerce bureau, Robert J. Bintaryo and the head of coftra market analysis bureau, Chrisnawan Triwahyuardhianto along with several Coftra's staffs.

We greatly welcomed the arrival of the world bank delegation. It means that they can see the importance of futures trading instrument for Indonesia as a big country that has some world commodities," Robert J. Bintaryo

In the discussion, some the world bank intention and purposes for visiting coftra were revealed, Robert added.

One of the example is their will to review on some commodities that tradeable in futures exchange.

"Moreover, they also want to do some reviews on some policies that can develop domestic futures trading industry. Including the policy review on over the counter trading, or alternative trading system," Robert said.

"But for sure the world bank will need to be discussed further with the leader-the trading minister as this subject has a correlation with bureau cooperation and also the trading ministry policy," Robert J. Bintaryo explained. ▲

Indonesia Will Only Have 1 Zone Time, GMT +8



According to The trading minister Gita Wirjawan, in regards to the overview of Indonesian time zones integration, the matter will give economical beneficiary.

"The time zone integration will give trading sector the benefit because the trading transaction in Indonesia can be done in the same

time.

This will give us beneficiary rather than doing trade transaction at west Indonesian time, then 2 hours later at east Indonesia.

In 2 hours there are so many things can be done for trading," Gita explained.

Indonesian time zone will use GMT+8 or same as current Middle Indonesian time.

"GMT + 8 time zone is also used by some countries such as China, Korea, Singapore, and Malaysia. Therefore using GMT + 8, our trading transaction time will be the same as those countries," Gita explained.

This time zone integration will not be only done in Indonesia. Brazil & Russian are also known having the same plan for integrating their time zone in business efficiency and effectivity purpose and also for nation security reason. ▲

Padjajaran University Will Open Futures Trading class.

University's paradigm nowadays need to be changed. University has to "ball pick up" what is needed by industry, especially in this matter commodity futures trading industry.

Current global economic growth required cooperation between university and industry in creating skilled human resources on their field.

"In regards to this, in the near future, we will open Manajemen Magister class in commodity futures trading,"

"Menciptakan SDM yang handal harus bisa disinergikan 'ABG' yakni academica, business and government.

"Creating a skillfull human resources, we need to synergize 'ABG' which are academica, business and

government.

He also said further that lately community has big influence towards industry growth. For example, association, people community, economic zone community and political parties.

"We are hoping on the new year class 2012-2013, Commodity Futures Trading Management Magister of Padjajaran University is opened for the society," Yuyus optimistically explained.

MM of Padjajaran University's first step in establishing the class is by holding seminar program on commodity futures trading.

This is to analyze people and industry interest.

"In the future, Management graduation in commodity futures trading will have a title of MMFT (Magister Futures Trading)," Yuyus Suryana added. ▲



Sang Motivator SEF

Stenly M. Pamikiran

Loyalitas tinggi, rasa memiliki dan punya identitas, adalah proses yang akan melahirkan dedikasi. Demikian Stenly Marcus Pamikiran menumbuhkan motivasi kepada karyawan manajemen PT. Starpeak Equity Futures (SEF).

“Memangnya saya sudah puas dengan jabatan direktur utama? Belum! Saya masih punya banyak impian. Saya ingin menjadi direktur utama bursa berjangka. Itulah salah satu trik yang saya sampaikan kepada karyawan untuk memacu motivasi mereka,” kata Stenly.

“Tapi, siapa tahu juga ya, ucapan itu bisa kenyataan di masa mendatang? Ya, mungkin ada bursa berjangka baru akan berdiri,” selorohnya.

Kesuksesan Stenly menggawangi SEF memang tidaklah terjadi dengan instan. Pria kelahiran Bitung, Sulut, 25 September 1971, ini, awalnya bergelut di bidang Information Technology (IT). Beberapa perusahaan berbasis IT pernah dirasakannya, diantaranya IMQ (international Market Quote).

Sarjana IT dari STMIK Jayakarta, tahun 2000, ini, merintis karier di industri perdagangan berjangka komoditi dari tahun 2004. Di PT. World Index Investment Futures (WIF) ayah dari tiga anak ini belajar tentang industri pasar berjangka, pasar modal, ekonomi dan keuangan secara otodidak.

“Semula di perusahaan itu saya sebagai konsultan IT-nya saja. Tapi akhirnya mereka merekrut saya. Saya menerima tawaran itu karena saya pun ingin sesuatu yang baru. Mungkin faktor kejenuhan menjadi seorang IT, yang kerjanya berpindah-pindah, lantas saya ingin kerja yang menetap di satu

ruangan,” jelas pehobi catur ini.

Langkahnya kian mantap di bidang perdagangan berjangka setelah dia berhasil mengantongi sertifikat Screen Trader dari Jakarta Futures Exchange dan menggondol izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti. Dengan prestasi gemilang, tahun 2006 Stenly didapuk jadi direktur utama perusahaan pedanga dari WIF. Selanjutnya di tahun 2009, dia pun dinobatkan menjadi Vice President WIF.

“Sekarang saya berada di perusahaan ini, berarti saya memulai dari nol lagi. Jadi, itulah fase-fase saya di bidang perdagangan berjangka,” ujar pria Libra, ini.

SEF merupakan peralihan dari PT Golden Financial Future, yang April 2012, lalu menyelenggarakan grand opening-nya. Perusahaan ini spesialis di bidang transaksi valas, indeks dan kontrak multilateral.

Dibenak Stenly, SEF akan dikembangkan dengan membuka cabang di kota besar lainnya seperti di Kota Medan, Bandung, dan Surabaya. “Tentunya kalau ingin mau maju harus ada planning, dan untuk berkompetisi kita harus kembangkan cabang di daerah. Dengan ada cabang di daerah lain, juga akan mendatangkan trust bagi investor. Bahwa perusahaan ini pun bonafide, tidak kacangan, dan benar-benar serius ingin berkembang.”

“Mudah-mudahan tahun 2013 SEF akan membuka cabang di daerah. Mungkin salah satu strategi membuka cabang di daerah kita mengundang partnership, tentu dengan MoU yang ketat dan sebagainya. Jadi, mereka bisa buka cabang, kita juga bisa joint venture,” jelas Stenly.

Kendati demikian, Stenly optimis

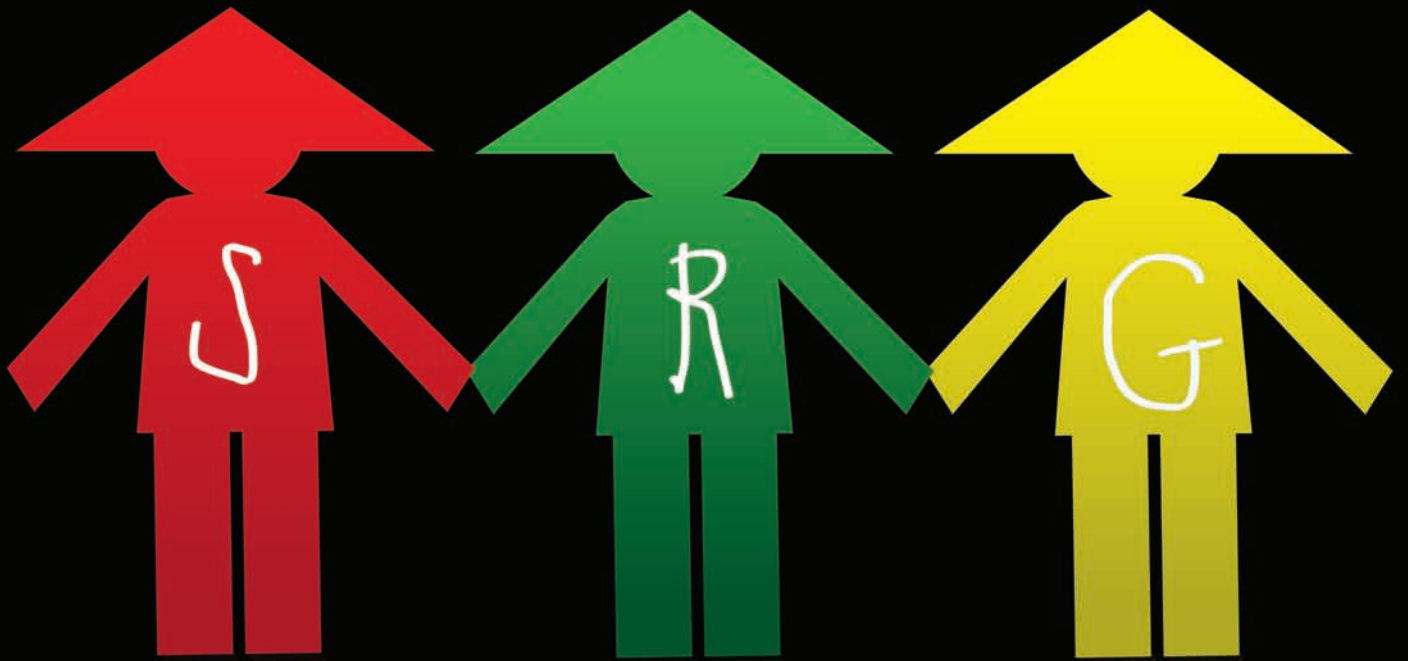
perusahaan yang diterjemahkan “bintang di atas puncak” ini, akan berusaha mengejar pangsa pasar di tengah ketatnya persaingan. “Kendala pasti ada, tentunya SEF harus menonjolkan keunikan, kenapa SEF dibutuhkan dan layak dipercaya. Saat ini kami terus berbenah dalam mengembangkan jati diri dan keunikan tersebut,” bebernya.

Salah satu keunikan SEF, kata Stenly, dengan recruitment yang ketat, marketing akan menjadi staff yang permanen yang nantinya diharapkan mampu menjadi wakil pialang. Selain itu, seluruh manajemen SEF akan di publish di situs resmi SEF. Stenly mengharapkan, diakhir tahun ini, keunikan SEF akan menjadi strength point yang bisa di jual, sehingga bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah lebih dahulu eksis.

Bertahun-tahun berkutat di industri perdagangan berjangka, Stenly mengaku banyak menemukan kenikmatan tersendiri. Menurutnya, pergaulan semakin luas karena banyak mengenal orang. “Saya banyak menemukan teman, network, pengetahuan, dan lainnya. Pada hal dulu saya tipikal introvert, tetapi sekarang bisa berubah menjadi extrovert, sangat berbeda ketika saya bekerja di dunia IT,” katanya.

Di balik kenikmatan itu, Stenly juga mengakui adanya kejenuhan. Obat jituanya yaitu ikut berbaur dan bergaul dengan staff SEF untuk berolahraga atau sekedar hangout.

“Marketing yang ada di SEF ini masih muda-muda, rata-rata umurnya di bawah 30 tahun. Jadi saya bergabung dengan mereka, alhasil energi saya ikut terbawa muda,” kata Stenly Pamikiran, optimis. ▲



Sistem Resi Gudang

STABILITAS HARGA
&
PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI